

BAB IV

P E N U T U P

Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2012 merupakan tahun 4 dari RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua jajaran dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target-target tahun terakhir periode RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi serta ditindak lanjuti dengan melakukan upaya dan terobosan yang lebih baik, untuk itu sangat diharapkan dukungan dari berbagai pihak demi tercapainya kinerja pemerintahan yang lebih baik dalam rangka terwujudnya manajemen berbasis kinerja sebagai pengewajantahan dari sistem pemerintahan yang *good governance* dan *clean dan governance*

Hasil Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Keberhasilan capaian kinerja yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (unsur perencanaan yang kurang efektif, kinerja pemerintahan, masyarakat,

dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dari analisis atas 4 sasaran strategis, bahwa dari keseluruhan indikator yang ada yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) yang kemudian dijadikan sebagai Indikator Kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis pada LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 pada umumnya mencapai angka capaian yang baik.

2. Pada umumnya program/ kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2012, sebagai turunan dari pencapaian target kinerja yang diperjanjikan di awal tahun, telah mencapai angka yang cukup baik dan memuaskan sekalipun masih ada beberapa yang belum mencapai target yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012. Dan kegagalan ini akan menjadi perhatian untuk disikapi sekaligus melakukan langkah-langkah yang positif demi tercapainya target kinerja tahunan.

A. SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dirumuskan menjadi saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran SKPD dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu, khususnya Pejabat Struktural setingkat Eselon III dan ke atas tentang pentingnya penerapan SAKIP agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna. Selain

daripada itu agar dimasa-masa yang akan datang pengumpulan data kinerja akan lebih memungkinkan diperoleh dengan baik dan tepat waktu, agar penyampaian Laporan Kinerja sebagai Bahan Pelaporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disampaikan ke Presiden RI melalui Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI dapat disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.

2. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan pemahaman SDM Aparatur dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provsinsi Sumatera Utara tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti menyelenggarakan pendampingan dan Bimbingan Teknis SAKIP secara komprehensif dan berkelanjutan untuk ditampung pada kegiatan pada APBD Pemprovsumu yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah perlu disinkronisasikan dan diselaraskan agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah.
4. Untuk penyusunan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada periode mendatang (2013-2019), agar dapat disusun tepat waktu dan secara sistematis serta terukur sebagaimana yang dimaksud pada SAKIP dan selaras dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja pada periode yang akan datang penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Medan, Maret 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

H. GATOT PUJO NUGROHO, ST